


Paradigma Pembangunan yang Kondusif untuk Kemandirian dan Kedaulatan Pangan & Energi*)

oleh:

Didin S. Damanhuri**)
(TIM IPB)

*)Seminar nasional dalam rangka Dies Natalis IPB ke-45 "Konvergensi Nasional untuk Kemandirian Pangan & Energi menuju Kedaulatan Bangsa", IPB International Convention Center/IICC, Bogor, 30 Oktober 2008.

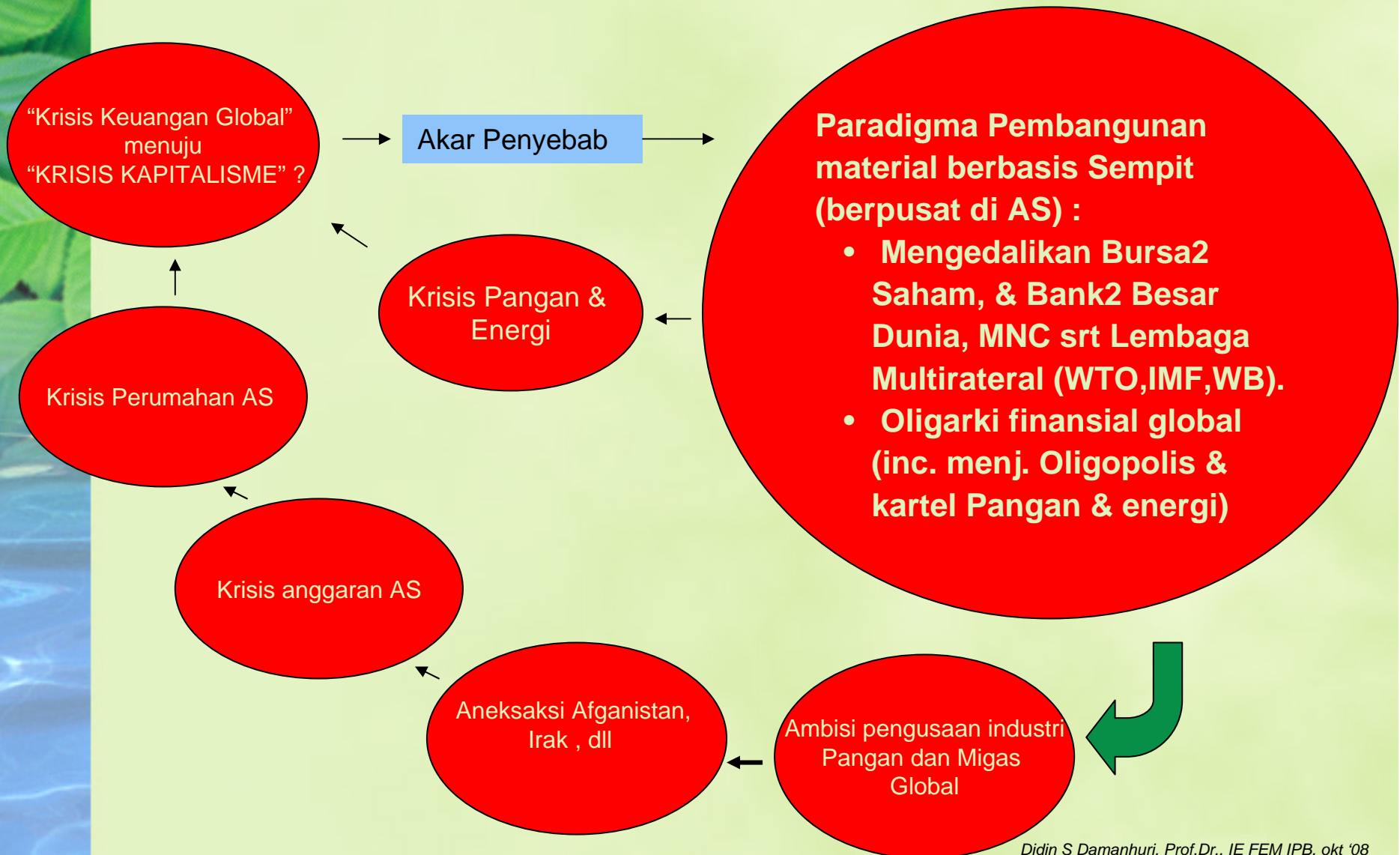
**)Guru Besar Fak.Ekonomi dan Manajemen IPB, Pendiri INDEF (*Institute for Development Economic & Finance*), Jakarta, Menerbitkan puluhan buku tentang Ekonomi, Pengamat Ekonomi, dll.




Ketidakmandirian dan ketidakberdaulatan pangan & energi nasional adalah resultante dari berbagai faktor :

- Warisan dari produk kebijakan masa lalu
- Produk dari perkembangan kontemporer

Mencari Akar Penyebab "Krisis Keuangan Global"





Perkembangan Kontemporer dalam Konteks Globalisasi serta Booming Ekonomi China dan India (lebih dari 1/3 penduduk Bumi)

- **Melonjaknya permintaan pangan & energi dr pasar dunia akibat booming ekonomi China dan India**
- **Melonjaknya biaya produksi pangan (biaya input, transportasi, dll) akibat krisis energi yang juga akibat bekutuhan energi dari booming ekonomi China dan india yang berujung pada melonjaknya harga–harga pangan dunia**
- **Beralihnya produksi pangan dunia (gandum, kedele, jagung) kepada produksi energi alternatif (biofuel) sehingga terjadi penciutan produksi pangan (kedele, jagung, gandum)**
- **Petumbuhan penduduk dunia yang relatif tinggi yang akhirnya mendongkrak permintaan pangan dunia**
- **Efek pemanasan global yang menyebabkan kegagalan panen tanaman pangan sehingga pada gilirannya menciutkan produksi pangan dunia**

Konstruksi Produk dari Warisan Kebijakan Masa lalu

Swasembada beras / pangan nasional (1983)

Bagian dari Strategi pemenuhan kebutuhan pokok, untuk mencapai stabilitas harga², stabilitas ekonomi & stabilitas politik dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi lewat Industrialisasi manufaktur

Ditegakan dengan sistem pemerintahan yang otoriter (represi militer, partai dominan & oligarki politik), dibiayai Utang&petro \$

Akhir 1980an:liberalisasi perekonomian (perbankan,pasar modal, perdagangan, dst.) yang tdk selektif (buka-bukaan)

Pergerakan Moneter jauh lebih besar dari pergerakan barang & jasa (*Decoupling*):

BUBBLE ECONOMY :
-Content impor industri makin mendekati 100%
- Impor Barang & Jasa termasuk bahan pangan kebutuhan pokok (beras, kedelai, jagung, gula, daging, dst.), buah²an, sayur²an makin besar

SUMBER KRISIS EKONOMI'98 (YNG BLM PULIH HNGGA KINI)

Big Bang Politik:

- Sistem multipartai
- Otonomi daerah
- Kebebasan pers

Demokratisasi
(1998)

Penanganan Krisis lewat
LoI IMF (diteruskan dng
White Paper = IMF)


Demokratisasi Politik dgn Politisasi & penggunaan Kebebasan yang Over Dosis

Pengelolaan konflik yang makin sulit, meski terdapat pelbagai sukses (aceh, maluku, dll.) tapi muncul berbagai konflik baru (pilkada, tanah, ruang usaha, dst.)

“Asingisasi” dlm penguasaan asset publik dan **ketrgantungan impor dari banyak barang kebutuhan pokok** (kedelai, jagung, gula, daging, garam, beras, gandum, buah-buahan, sayur-sayuran, dst) & Mnyusutnya sumberdana Migas (net-Importir)


SEMENTARA, PRODUKSI DALAM NEGERI :

Produktivitas Stagnan, Teknologi tertinggal, dan makin *lack of Vision* terhadap kemandirian & Kedaulatan pangan & Energi dari Pemerintah, khususnya dari otoritas ekonomi.




Kebijakan Pemerintah Pasca Orba terhadap Warisan Masa lalu & Perkembangan kontemporer

- Tetap berkuat pada ukuran sukses yang mengacu semata kepada Stabilitas ekonomi makro (pertumbuhan, inflasi, kurs rupiah, suku bunga, dst.)
- Tak ada **Blue Print** Reformasi ekonomi menyeluruh atas dasar : (1) Assesment kebutuhan nyata (*felt need*) rakyat dan keragaman daerah ; (2) *Market Intelligence* dari perkembangan ekonomi global.



Hambatan Mewujudkan Kemandirian & Kedaulatan Pangan & Energi (1)

- Demokrasi Politik & Kepemimpinan yang hanya menciptakan “kompradorisasi” yang dependen terhadap kepentingan negara maju
- Ukuran sukses pembangunan hanya semata ditekankan kepada stabilitas Makro Ekonomi dg menganggap globalisasi sebagai fenomena yang netral, bahkan sumber kemajuan tanpa sikap kritis



Hambatan Mewujudkan Kemandirian & Kedaulatan Pangan & Energi (2)

- Industrialisasi yang berbasis impor dan mengabaikan *competitive advantage* berbasis sumber daya domestik (SDA, SDM, kreativitas, dst.) dengan iptek dan nilai lokal
- Ketiadaan *grand-design* yang komprehensif untuk kemandirian dan kedaulatan pangan & energi (dari payung kebijakan makro ekonomi dg dukungan kebijakan fiskal, moneter, perbankan, penyuluhan, pengembangan teknologi, hingga gerakan budaya dan kebijakan industrialisasi yang berbasisan sumberdaya domestik (pertanian dlm arti luas) & diversifikasi energi.

Paradigma Baru Pembangunan



Perspektif Masa Depan

Ada dua skenario dalam perspektif Ekonomi-Politik Pangan di Indonesia pada mana datang :

- **Skenario Pertama**

Jika kebijakan ekonomi yang menjadi payungnya tetap sebagai "business as usual":

- **Demokratisasi politik berjalan makin menemukan format yang semakin matang : disamping prosedur demokrasi berjalan, juga proses dan kualitas output politik makin mendkati prinsip kedaulatan politik rakyat. Namun karena Demokrasi Politik cenderung makin mengadopsi prinsip liberalisasi ekonomi ala WTO, maka kedaulatan ekonomi makin tergantung asing dan makin menjauhkan kedaulatan ekonomi rakyat termasuk makin jauh dari kedaulatan pangan & energi (makin tergantung impor)**

- **Skenario Kedua**

Jika dilakukan Reformasi ekonomi berbasiskan kpd assement kebutuhan nyata rakyat dan keragaman daerah dengan *Blue print* dan pelaksanaan yang konsekuen:

- **kemungkinan karena banyak kepentingan Negara Maju yang terganggu, maka bisa saja proses dmokarasi politik mmbawa komplikasi krn bnyak kepentingan Negara Maju secara Ek. & Pol telah tertanam secara struktural dalam komposisi elit sekarang ini.**

Tapi itu tergantung kepada kepemimpinan nasional, apakah mampu mngelola secara cerdas dua kepentingan sekaligus (demokrasi politik dan reformasi ekonomi secara substansial)

Rekomendasi kebijakan (1)

Jangka Pendek (1 tahun):

Stabilisasi harga pangan & energi untuk mencapai “ketahanan pangan & energi” melalui kebijakan insentif untuk peningkatan produksi maupun kebijakan perdagangan (tarif impor) dg disertai pengamanan dari pelbagai modus “*moral hazard*” (spekulasi, penimbunan, penyelundupan, kartel importir, dll.)

Rekomendasi kebijakan (2)

Jangka Menengah & Panjang (2009-14 ; 20014-30):

- Perlu Komite Globalisasi yg menyiapkan program aksi berbasiskan visi kepentingan nasional untuk menyusun *blueprint* reformasi ekonomi bersamaan dengan demokratisasi politik yang mensejahterakan rakyat dg Model Pemb yg "Asian Way" (keseimbangan yg tepat Peran Negara & Pasar)
- Perlu kebijakan makro dan mikro ekonomi serta industrialisasi yang menekankan *competitive advantage* berbasiskan sumberdaya domestik (SDA, SDM, kreativitas, dst.) (Res.based Ind) dengan kandungan iptek dan nilai lokal srt pengembangan "Unit Banking System" yang berorientasi "full employment policy".
- Perlu *grand design* kebijakan untuk mencapai kemandirian & kedaulatan pangan & energi nasional, regional dan lokal berbasiskan sumberdaya dan keunggulan daerah.



TRIMA KASIH